



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 04 /Kpts/KPU-Wng-012329512/2012

#### TENTANG

#### DATA DAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI KEADAAN BULAN JANUARI – JUNI 2012

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memberikan pelayanan data dan informasi atas permohonan informasi publik dari masyarakat oleh Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang tersedia di perpustakaan, pusat informasi masyarakat maupun situs resmi (website) perlu untuk melakukan inventarisasi dan klasifikasi data kepemiluan dan non kepemiluan yang telah dikuasai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - b. bahwa data kepemiluan dan non kepemiluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik yang berupa fisik dan non fisik harus dapat diakses oleh masyarakat dengan prinsip mudah, cepat, cermat dan akurat;
  - c. bahwa untuk mempermudah pelayanan informasi publik kepada masyarakat diperlukan klasifikasi informasi yaitu informasi yang dikuasai, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat ;
  - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Informasi Publik yang dikuasai pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) keadaan bulan Januari - Juni 2012 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 19/Kpts/KPU Prov-012/Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih ( PIPP ) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 21/Kpts/KPU Prov-012/Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi dan Pendidikan pemilih ( PIPP ) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

**Memperhatikan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2011 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih ( PPIP ) dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Data dan Informasi Publik yang dikuasai pada Pusat Informasi Dan Pendidikan Pemilih (PIPP) oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, keadaan bulan Januari – Juni 2012 sebagaimana pada Lampiran keputusan ini ;

- KEDUA** : Data dan informasi yang dikuasai dimaksud, adalah data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri ;
- KETIGA** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepemiluan dan non kepemiluan kepada masyarakat ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 untuk KPU Kabupaten Wonogiri ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri  
Pada Tanggal 05 Juli 2012



**DATA DAN INFORMASI YANG DIKUASAI**  
**PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PPIP) OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

PERIODE : JANUARI - JUNI 2012

NO	NON PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA					
	KEGIATAN	REGULASI	JENIS DATA	BENTUK DATA / INFORMASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>SUBBAG : PROGRAM DAN DATA</b>						
1	Laporan Kegiatan		1 Laporan Pelaksanaan Tugas Bulan Januari 2 Laporan Pelaksanaan Tugas Bulan Februari 3 Laporan Pelaksanaan Tugas Bulan Maret 4 Laporan Pelaksanaan Tugas Bulan April 5 Laporan Pelaksanaan Tugas Bulan Mei 6 Laporan Kegiatan Triwulan I	Soft Copy dan Hard Copy Soft Copy dan Hard Copy	KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri	
2	Rencana Kerja TA. 2012		1 Rencana Kegiatan TA. 2012 2 Rencana Kegiatan TA. 2012 (Revisi I) 3 Rencana Kegiatan Bulanan TA. 2012 4 Rencana Kinerja Tahunan TA. 2012 5 Penetapan Kinerja TA. 2012 6 Pernyataan Penetapan Kinerja TA. 2012	Soft Copy dan Hard Copy Soft Copy dan Hard Copy	KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri	

NON PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA

NO	NON PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN					
	KEGIATAN	REGULASI	JENIS DATA	BENTUK DATA / INFORMASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SUBBAG : KEUANGAN UMU DAN LOGISTIK					
1	Anggaran Tahun 2012		1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 2 RKA-KL Tahun 2012 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 Revisi I	Hard Copy Hard Copy & Soft Copy Hard Copy	KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri	
2	Laporan Keuangan		1 LPJ Bulan Januari 2012 2 LPJ Bulan Februari 2012 3 LPJ Bulan Maret 2012 4 LPJ Bulan April 2012 5 LPJ Bulan Mei 2012	Hard Copy & Soft Copy Hard Copy & Soft Copy Hard Copy & Soft Copy Hard Copy & Soft Copy Hard Copy & Soft Copy	KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Wonogiri	
1	SUBBAG : HUKUM					
1	Peraturan - Peraturan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 168/PMK-07/2008  Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor Nomor : PER-57/PB/2010  Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2011 tanggal 15 Januari 2011  Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011  Surat KPU nomor 205/SJ/II/2011 tanggal 16 Februari 2011	Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara  Hibah Daerah  Tata Cara Penetapan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana  Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik  Perubahan ke tiga belas atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS  Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2011	Hardcopy Hardcopy Softcopy Softcopy Softcopy	Permendagri Permenkeu  Perdijen Perbendaharaan  UU RI PP RI KPU	

NO	NON PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA					
	KEGIATAN	REGULASI	JENIS DATA	BENTUK DATA / INFORMASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011	Tata cara pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Induk dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kotanya yang dibentuk setelah Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Softcopy	KPU	
		Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor Nomor : PER-10/PB/2011 tanggal 17 Pebruari 2011	Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga	Softcopy	Perdijen Perbendaharaan	
		Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor Nomor : PER-22/PB/2011 tanggal 18 April 2011	Tata Cara Revisi DIPA TA 2011	Softcopy	Perdijen Perbendaharaan	
		Undang Undang RI Nomor 8 tahun 2012, tanggal 11 Mei 2012	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Softcopy	UU RI	
		Peraturan Direktorat Jendral Anggaran Nomor Nomor : PER-03/PB/2011 tanggal 24 Mei 2011	Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012	Softcopy	Perdirjen Anggaran	
		Peraturan KPU Nomor 02 tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011	Perubahan Atas Peraturan KPU nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR dan DPRD Pemilihan Umum Tahun 2009	Softcopy	KPU	
		Peraturan KPU Nomor 03 tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011	Perubahan atas Peraturan KPU nomor 22 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009		KPU	
		Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.02/2011 tanggal 30 Juni 2011	Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012	Softcopy	Kemenkeu	

NO	NON PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA					
	KEGIATAN	REGULASI	JENIS DATA	BENTUK DATA / INFORMASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2011 tanggal 1 Juli 2011	Pedoman Standar Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, KPU Kabupaten, dan KIP kabupaten/Kota	Softcopy	KPU	
		Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor Nomor : PER-39/PB/2011 tanggal 16 Juli 2011	Perubahan peraturan Direktorat jendral Perbendaharaan Nomor : PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang	Softcopy	Perdijen Perbendaharaan	
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tanggal 8 Agustus 2011	Pengolahan Barang milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011	Softcopy	Permenkeu	
		Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK-06/2011 tanggal 15 Agustus 2011	Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga	Softcopy	Kemenkeu	
		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor : 19/Kpts/KPU Prov-012/Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011	Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih ( PPIP ) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Hardcopy & softcopy	KPU Provinsi	
		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor : 21/Kpts/KPU Prov-012/Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011	Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi dan pendidikan Pemilih ( PPIP ) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Hardcopy & softcopy	KPU Provinsi	
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 tanggal 10 Oktober 2011	Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	Softcopy	Permenkeu	
		Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011	Pedoman Pemberian Uang Penghargaan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum	Softcopy	KPU	

NO	NON PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA					
	KEGIATAN	REGULASI	JENIS DATA	BENTUK DATA / INFORMASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor Nomor : PER-41/PB/2011	Perubahan Atas Peraturan Direjen Perbendaharaan Nomr 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penetapan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana	Softcopy	Perdijen Perbendaharaan	
		Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 16 Oktober 2011	Penyelenggara Pemilihan Umum	Softcopy & Hardcopy	UU RI	
		Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor Nomor : PER-73/PB/2011 tanggal 3 November 2011	Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011	Softcopy	Perdijen Perbendaharaan	
		Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor Nomor : PER-76/PB/2011 tanggal 16 November 2011	Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Uang Penghargaan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu 2004	Softcopy	Perdijen Perbendaharaan	
		Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor Nomor : PER-80/PB/2011 tanggal 30 November 2011	Penambahan dan perubahan akun pendapatan belanja dan transfer pada bagan akun standar	Softcopy	Perdijen Perbendaharaan	
		Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor : PER 81/PB/2011 tanggal 30 November 2011	tata Cara Pengesahan Hibah Lansung bentuk uang dan penyampaian memo pencatatan hibah lansung bentuk barang/jasa/surat berharga	Softcopy	Perdijen Perbendaharaan	
		Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor : PER 82/PB/2011 tangga 30 November 2011	Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang tak tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga	Softcopy	Perdijen Perbendaharaan	
		Keputusan Presiden RI Nomor 33 tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011	Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota badan Pengawas Pemilu	Softcopy	Kepres	

NO	NON PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA					
	KEGIATAN	REGULASI	JENIS DATA	BENTUK DATA / INFORMASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor : PER 85/PB/2011 tanggal 5 Desember 2011	Penata Usahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pada pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga	Softcopy	Perdijen Perbendaharaan	
		Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor : PER 88/PB/2011 tanggal 16 Desember 2011	Perubahan Kedua atas Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor PER 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penetapan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana	Softcopy	Perdijen Perbendaharaan	
		Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor : PER 89/PB/2011 tanggal 21 Desember 2011	Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	Softcopy	Perdijen Perbendaharaan	
		Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 233/PMK-05/2011 tanggal 23 Desember 2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	Softcopy	Permenkeu	
		Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-05/2011 tanggal 23 Desember 2011	Sistem Akuntansi Transaksi Khusus	Softcopy	Permenkeu	
		Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor : PER 90/PB/2011 tanggal 27 Desember 2011	Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara pada sistem modul penerimaan niaga	Softcopy	Perdijen Perbendaharaan	
		Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-680/MK.1/2011	Pelaksanaan Anggaran tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Kementerian Keuangan , tanggal 27 Desember 2011	Softcopy	SE Mekeu	
		Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor S 12082/PB/2011, tanggal 30 Desember 2011	pemberian Dispensasi Penerimaan SPM-GUP Nihil Rekening Khusus pada Akhir tahun Anggaran 2011	Softcopy	Surat Dirjen Perbendaharaan	
		Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D.IX/2011	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati tahun 2011	Hardcopy	Putusan MK	

# N I H I L

Wonogiri, Juni 2012



Drs. JOKO PURNOMO